Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Agenda Pembangunan Nasional

Taufiq Hidayat Putra, ST, M.Eng, PhD
Plt Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional
Kementerian PPN/Bappenas

23 Juni 2021

Impian Indonesia 2015 – 2085 dan Visi Indonesia 2045

Kementerian PPN/ Bappenas

Untuk mempercepat perwujudan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menggagas Impian Indonesia 2015 - 2085

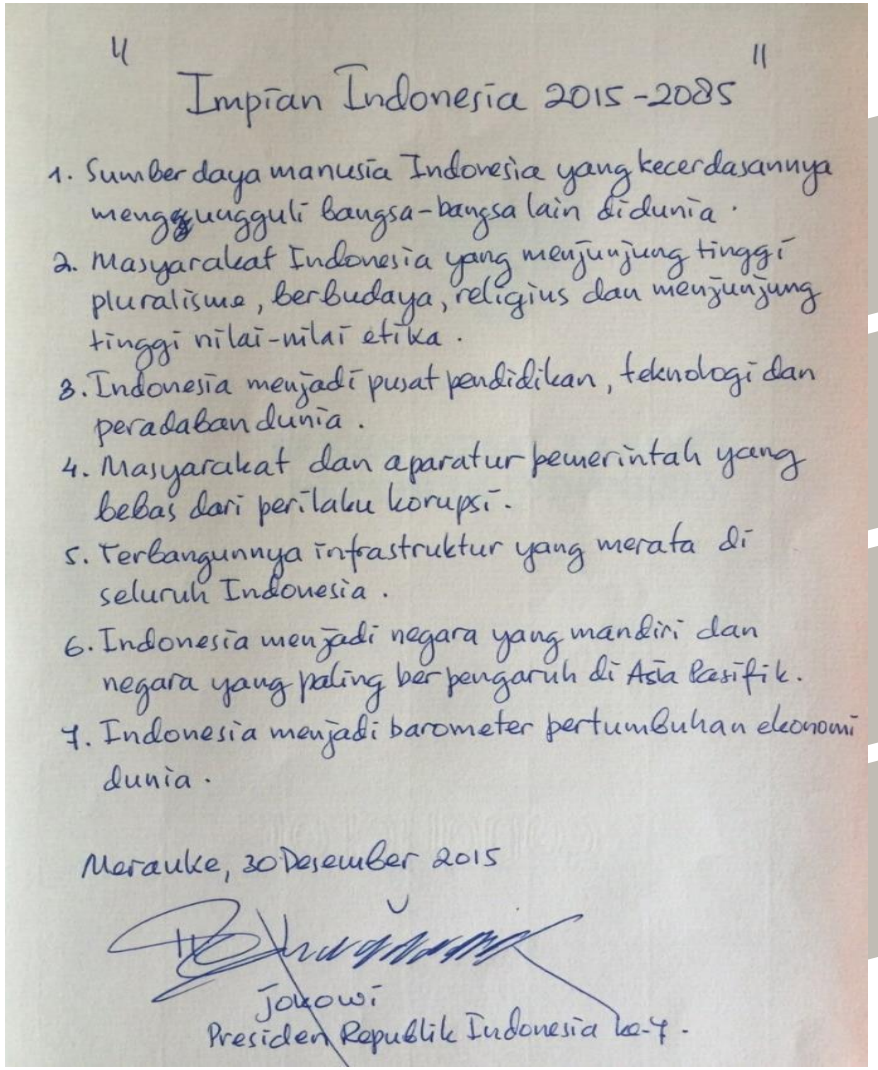

"Impian Indonesia 2015-2085"

1. Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia.
2. Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
3. Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia.
4. Masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi.
5. Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia.
6. Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik.
7. Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

Merauke, 30 Desember 2015

Jokowi
Presiden Republik Indonesia ke-7.

Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia

Memajukan kesejahteraan umum

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

VISI
INDONESIA

BERDAULAT

MAJU

ADIL DAN MAKMUR

Menuju Negara Pendapatan Tinggi dan Salah Satu PDB Terbesar Dunia di 2045

Kementerian PPN/ Bappenas

Megatren Dunia 2045

Demografi Global

Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar (Asia 55%). Tren demografi global mendorong urbanisasi, arus migrasi, dan penduduk usia lanjut

Urbanisasi Dunia

Penduduk dunia yang tinggal di perkotaan mencapai 66% dengan 95% pertambahan terjadi di *emerging economies*

Peranan *Emerging Economies*

Output negara berkembang 71% dari total output dunia dengan Asia sebagai pendorong utama sebesar 54%

Perdagangan Internasional

Perdagangan global tumbuh 3,4% per tahun. Negara berkembang menjadi poros perdagangan dan investasi dunia dengan pertumbuhan 6% per tahun

Keuangan Internasional

Dominasi mata uang dunia bergesar dari dolar AS menjadi *multi currency*. Aset keuangan *emerging economies* diperkirakan melebihi negara maju

Kelas Menengah

Jumlah middle dan upper class lebih dari 84 persen (8,1 miliar) yang didominasi oleh Asia dan Amerika Latin

Persaingan Sumber Daya Alam

Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan merebutkan SDA. *Technological advancement* meningkatkan efisiensi eksploitasi SDA

Teknologi

Tren perubahan teknologi yang didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetik, *wearable devices*, energi terbarukan, otomatisasi, dan *artificial intelligence*

Perubahan Iklim

Tantangan pemanasan global semakin besar (kejadian ekstrim dan perubahan iklim jangka panjang. Suhu global meningkat 3-3,5% tanpa adanya usaha menurunkan emisi

Perubahan Geopolitik

Peningkatan peranan Cina, kerentanan di kawasan Timur Tengah, serta meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu

Indonesia Menuju Negara Maju

Kementerian PPN/ Bappenas

SKENARIO PDB PER KAPITA 2015 - 2045

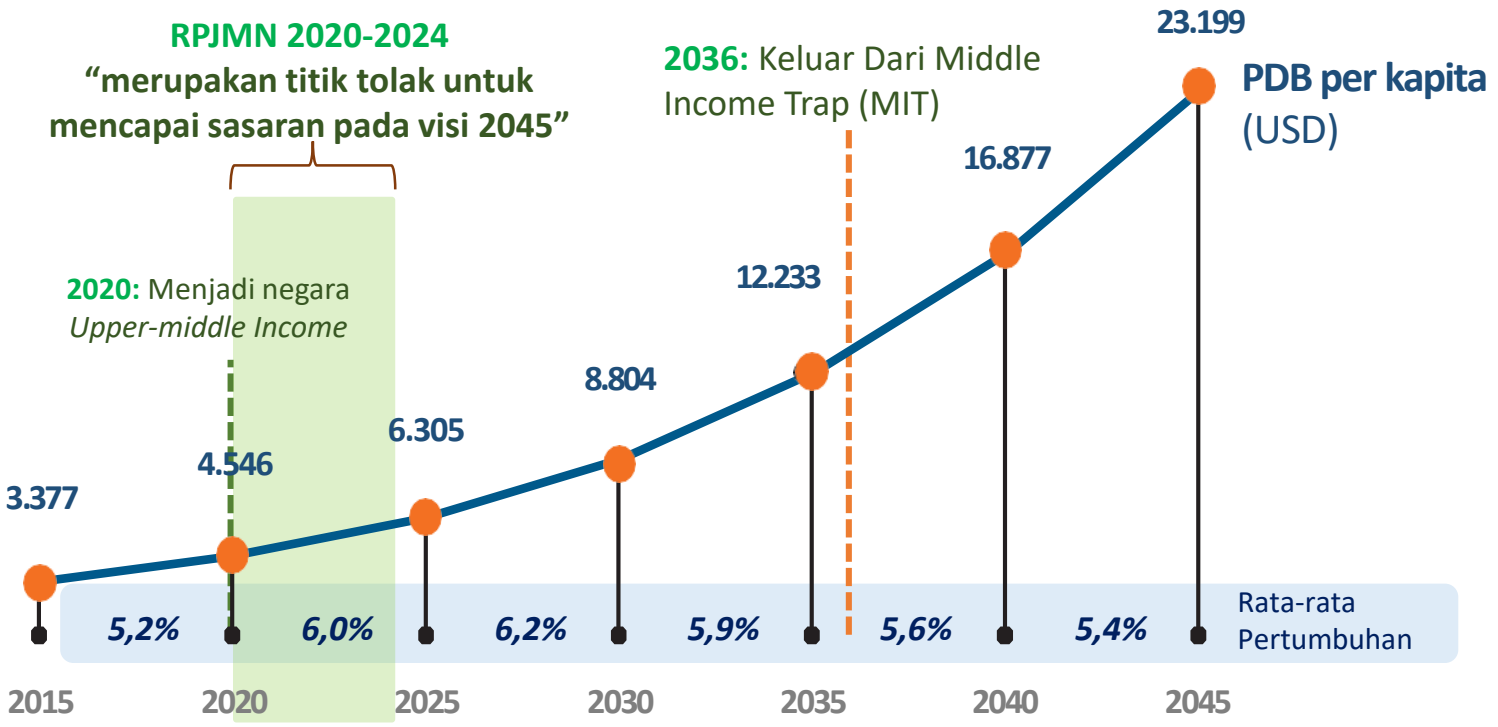

TRANSFORMASI EKONOMI harus dimulai pada tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju

TRANSFORMASI EKONOMI

1 Mendorong Industri Pengolahan

		2018	2024
1	Meningkatkan kontribusi industri pengolahan	19,9%	21,0%
2	Meningkatkan kontribusi industri pengolahan nonmigas	17,6%	18,9%
3	Meningkatkan kontribusi tenaga kerja di sektor industri	14,9%	15,7%

2 Mendorong Sektor Pariwisata

	2018	2024
Devisa Pariwisata (Miliar USD)	19,3	30,0

3 Mendorong Ekonomi Kreatif

		2018	2024
1	Nilai tambah ekonomi kreatif (Triliun Rupiah)	1.105	1.846
2	Nilai transaksi e-commerce (Triliun Rupiah)	170	600

Rata-rata pertumbuhan 2015-2045:

PDB Riil	PDB Riil/Kapita
5,7%	5,0%

Tahun 2045:

Negara Maju & PDB terbesar	Peranan KTI menjadi
Ke-5 (USD 7,4 triliun)	25%

Manusia Indonesia unggul, berbudaya, dan menguasai iptek

Ekonomi maju dan berkelanjutan

Pembangunan merata dan inklusif

Negara demokratis, kuat, dan bersih

Pilar Pembangunan Indonesia 2045

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUASAAN IPTEK

- Percepatan Taraf Pendidikan Rakyat Indonesia secara Merata
- Peningkatan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan
- Peningkatan Sumbangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pembangunan
- Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kualitas Hidup Rakyat
- Reformasi Ketenagakerjaan

PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

- Peningkatan Investasi dan Daya saing ekonomi
- Percepatan Industri dan Pariwisata
- Pembangunan Ekonomi Maritim
- Pemantapan Ketahanan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Peningkatan Ketahanan Energi dan Air
- Komitmen terhadap Lingkungan Hidup

PEMERATAAN PEMBANGUNAN

- Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- Pemerataan Kesempatan Usaha dan Pendapatan
- Pemerataan Pembangunan Wilayah
- Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi

PEMANTAPAN KETAHANAN NASIONAL DAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN

- Demokrasi Substantif
- Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi
- Penguatan Sistem Hukum Nasional dan Antikorupsi
- Politik Luar Negeri Bebas Aktif
- Penguatan Pertahanan dan Keamanan

Mengoptimalkan Bonus Demografi: Sebagai Jalan Keluar dari Middle Income Trap

Kementerian PPN/ Bappenas

RASIO KETERGANTUNGAN 2015-2045

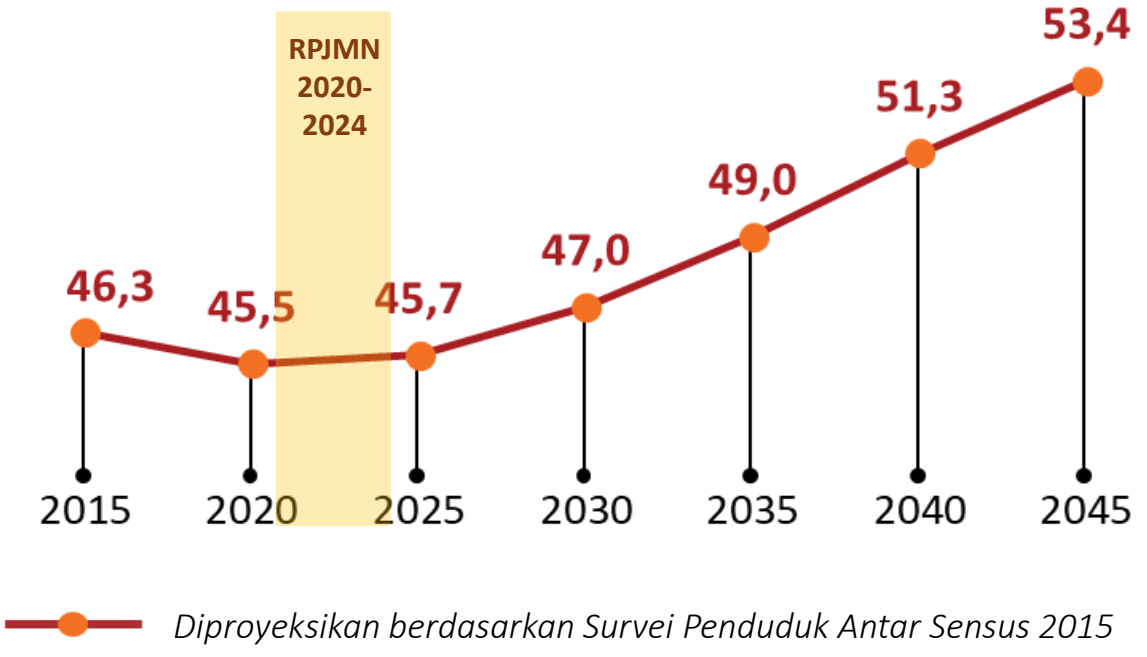

Rasio ketergantungan terendah terjadi pada 2022

SKENARIO PDB PER KAPITA 2015 - 2019

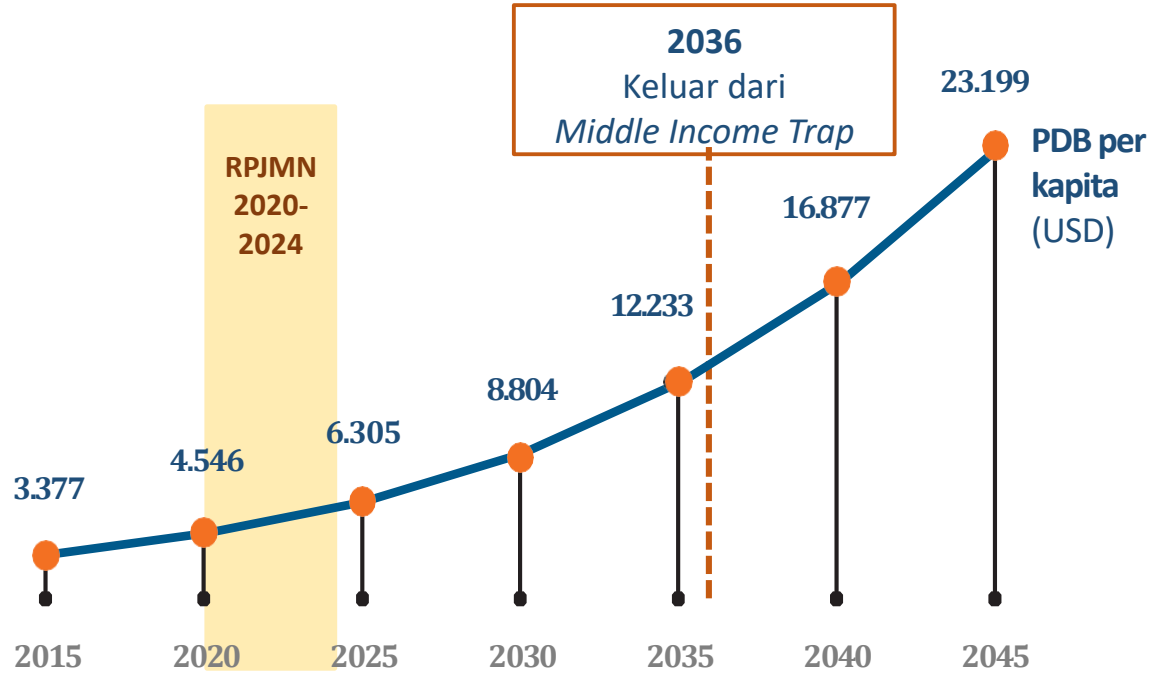

TRANSFORMASI EKONOMI harus dimulai pada tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia maju

- Momentum bonus demografi akan dimanfaatkan untuk keluar dari *middle-income trap* pada tahun 2036
- Pembangunan manusia menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMN 2020-2024

Melanjutkan Investasi Pembangunan Infrastruktur

Kementerian PPN/ Bappenas

ALOKASI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Meningkat 3x lipat pada 5 tahun terakhir

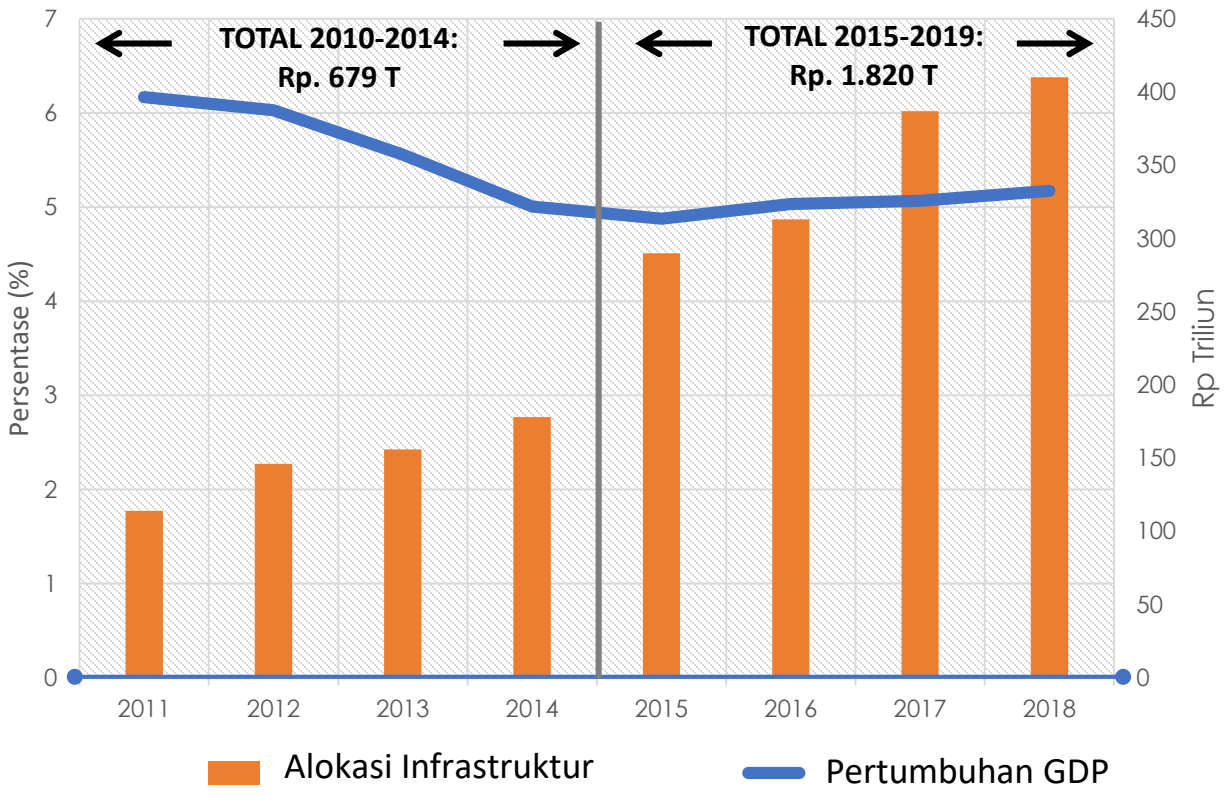

*Source: Nota Keuangan RAPBN 2019

STOK INFRASTRUKTUR INDONESIA (% GDP)

Tren penurunan melambat, stok infrastruktur meningkat

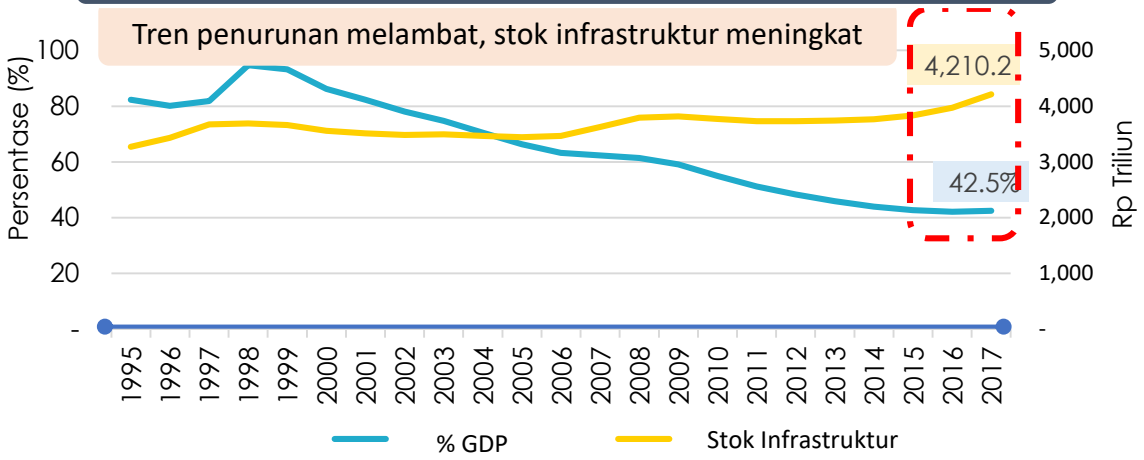

Berdasarkan Persentase GDP (LHS) dan Rp triliun (RHS)

Sumber: Prospera

Perbandingan Stok Infrastruktur (% PDB)

Di bawah rata-rata Internasional

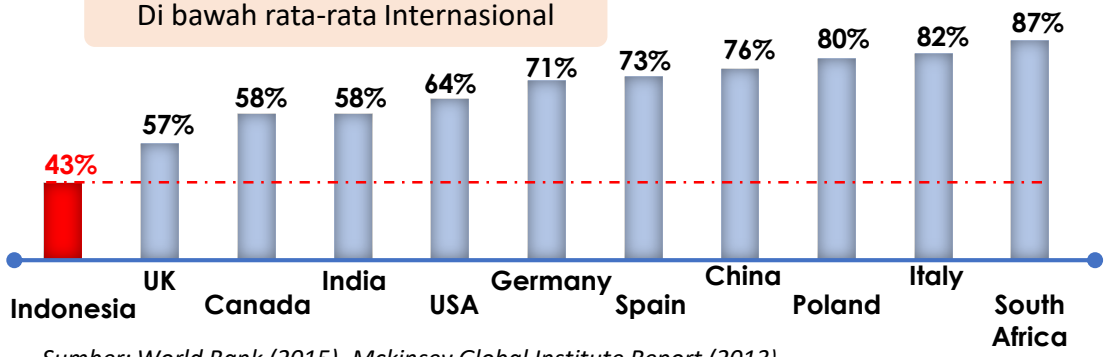

Sumber: World Bank (2015), Mckinsey Global Institute Report (2013)

Peningkatan alokasi infrastruktur dibutuhkan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi
(Stok infrastruktur saat ini **43%,di bawah rata-rata *"developed and emerging countries"* (70%)**

Arah Pembangunan Infrastruktur Jangka Panjang

Kementerian PPN/ Bappenas

Arah Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi

- Meningkatkan Konektivitas Fisik dan Virtual
- Mendorong Pemerataan Pembangunan antar Wilayah
- Memenuhi Prasarana Dasar
- Mendukung Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan
- Antisipasi terhadap Perubahan Iklim

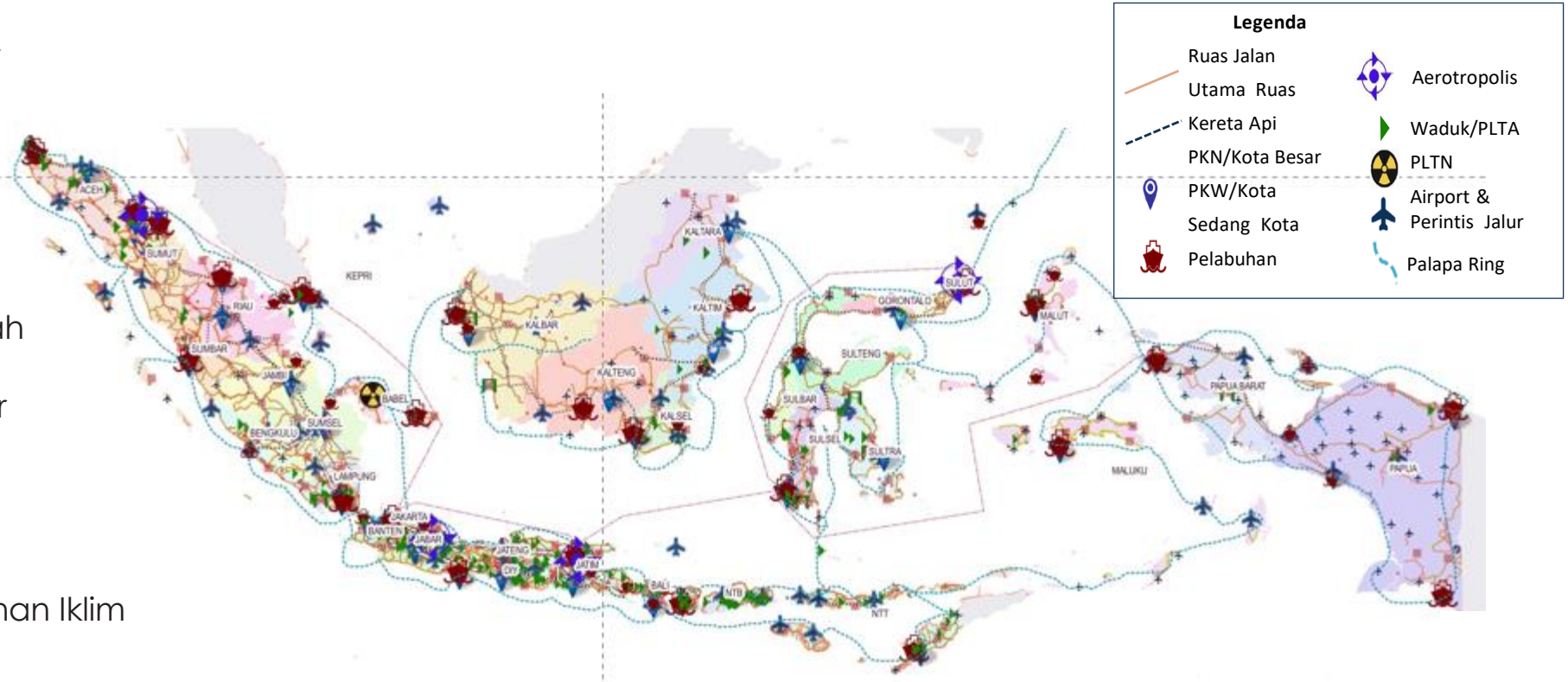

Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Kementerian PPN/ Bappenas

Pembangunan Infrastruktur berkontribusi terhadap pencapaian **10** dari **17** tujuan pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 32 target.

Highlight Dukungan Infrastruktur

TUJUAN 6 — MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

- Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Aman
- Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman
- Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu

TUJUAN 7 — MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA

- Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga
- Rasio Elektrofikasi
- Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan

TUJUAN 9 — MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

- **Kondisi Mantap Jalan Nasional**
- **Pembangunan Jalan Tol**
  Panjang Pembangunan Jalan Tol
- **Pembangunan Kereta Api**
  Panjang Jalur Kereta Api
- **Konektivitas Udara**
  Jumlah Bandara
- **Konektivitas Laut**
  Jumlah Pelabuhan Penyeberangan, Pelabuhan Strategis
- **Transformasi Digital**
  Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband

Stok dan Indeks Kinerja Infrastruktur

STOK INFRASTRUKTUR MASIH DI BAWAH RATA-RATA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DAN MAJU

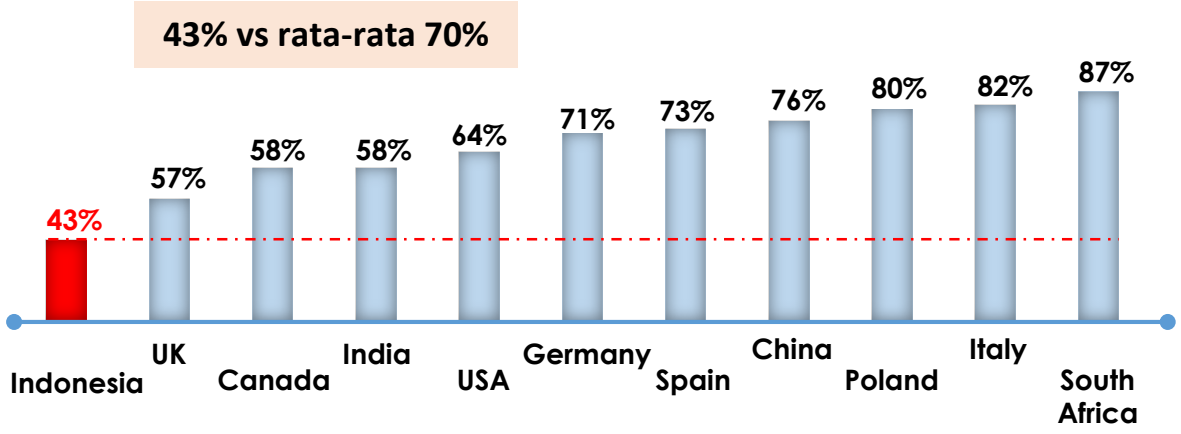

Sumber: Bappenas Prospera (2019)

INDEKS KINERJA INFRASTRUKTUR MASIH RENDAH

- Global Competitiveness Index (GCI) tertinggal dari Malaysia, China dan Thailand
- Logitic Performance Indek (LPI) tertinggal dari China, Thailand dan Vietnam

Sumber: Laporan Daya Saing Global dari Forum Ekonomi dan Indeks Kinerja Logistik Bank Dunia.
Catatan: Ukuran gelembung sebanding dengan PDB per kapita 2019.

Kinerja Komponen Infrastruktur

WAKTU TEMPUH PADA LINTAS UTAMA MASIH TINGGI

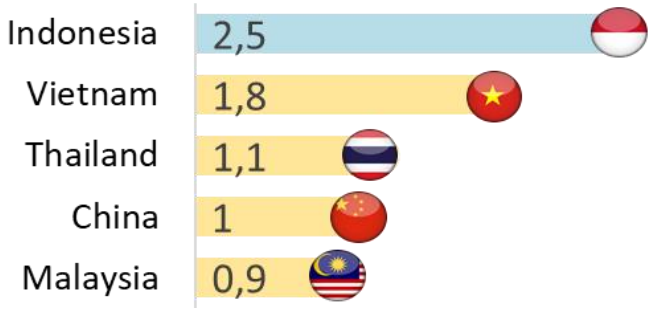

Waktu tempuh pada lintas utama (jam per 100 Km)

Sumber: Indonesia Infrastructure Initiative (2012)

ANGKUTAN UMUM MASSAL PERKOTAAN MASIH TERBATAS

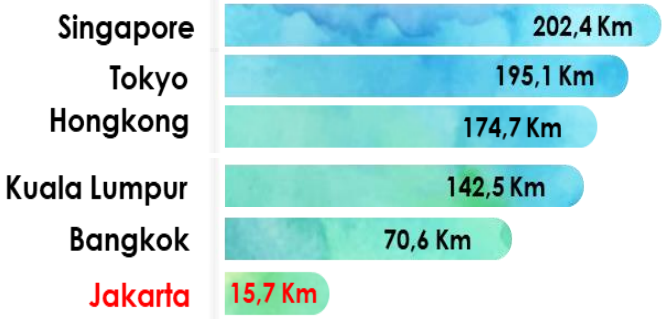

Panjang Jaringan MRT (Km)

Sumber: Kajian Bappenas (2019)

PENYEDIAAN AKSES TENAGA LISTRIK BELUM TUNTAS

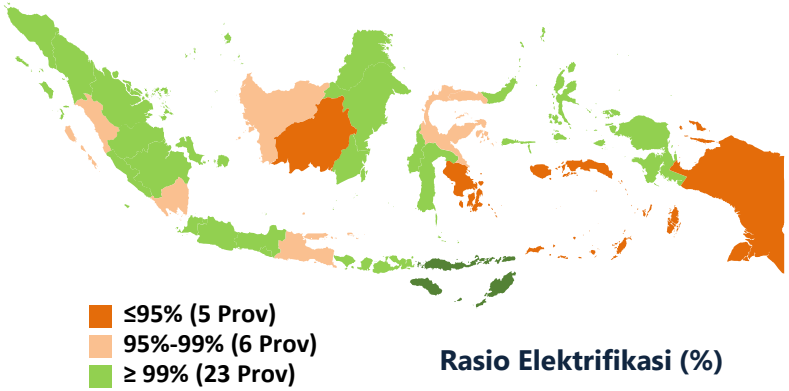

Rasio Elektrifikasi (%)

KAPASITAS TAMPUNGAN PER KAPITA JAUH DARI IDEAL

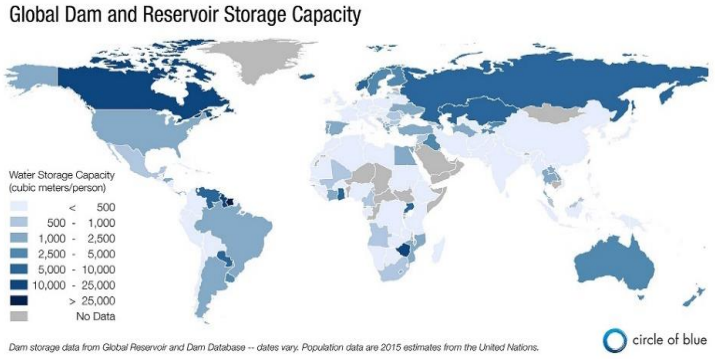

Kapasitas tampungan (m3/kapita)

AKSES HUNIAN LAYAK MASIH RENDAH & ANGKA KUMUH PERKOTAAN TINGGI

Rumah Tangga Menempati Hunian Layak — **59,54 %** (Tahun 2020)

Luas Permukiman Kumuh di **Kota Inti 10 Wilayah Metropolitan** — **5.730,78 Hektar**

(1 dari 5 penduduk perkotaan di Indonesia tinggal di permukiman kumuh)

AKSES AIR MINUM PERPIPAAN, SANITASI LAYAK DAN AMAN, SERTA PERSAMPAHAN BELUM OPTIMAL

Akses Air Minum Perpipaan	**20,96%** (Tahun 2020)
Akses Sanitasi Layak dan Aman	**79,53%** (Tahun 2020)
Akses Penanganan Persampahan	**54,85%** (Tahun 2020)

Agenda Pembangunan

Visi-Misi Presiden	
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Arahan Presiden	
1	Pembangunan SDM
2	Pembangunan Infrastruktur
3	Penyederhanaan Regulasi
4	Penyederhanaan Birokrasi
5	Transformasi Ekonomi

7 Agenda Pembangunan
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran 2020-2024 : Pembangunan yang Berkualitas

Tingkat Kemiskinan (persen)
6,0 – 7,0
Mar 2019: 9,41

Pertumbuhan Ekonomi (persen)
6,0
2015-2018: 5,0

Gini Rasio (indeks)
0,360 – 0,374
Mar 2019: 0,382

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)
3,6 – 4,3
Agt 2019: 5,28

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)
75,54
2018: 71,39

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)
27,3%
2018: 22,5%

Kerangka Pembangunan Infrastruktur 2020-2024

Kementerian PPN/ Bappenas

Infrastruktur Pelayanan Dasar

- Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau
- Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan
- Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) Layak dan Aman
- Keamanan dan Keselamatan Transportasi
- Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Infrastruktur Ekonomi

Konektivitas

Tol Laut + Antarmoda

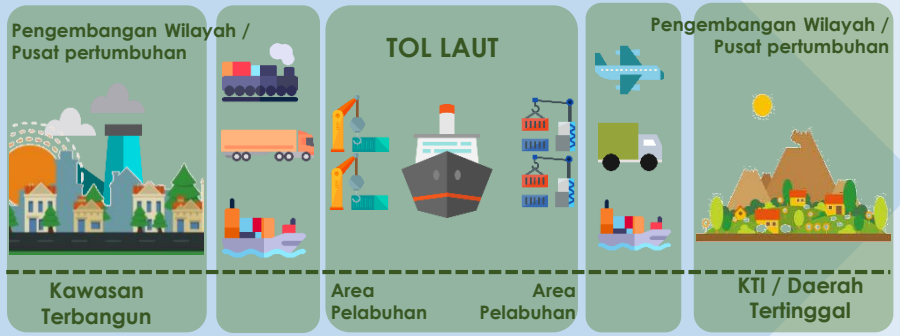

Aksesibilitas Daerah Tertinggal

Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi

Sektor Ekonomi

- Pertanian-Perkebunan-Kelautan Perikanan
- Industri Pengolahan
- Jasa dan Pariwisata

Infrastruktur Perkotaan

- Pembangunan Transportasi Perkotaan
- Energi Berkelanjutan untuk Perkotaan
- Infrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan
- Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman
- Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan

Pembangunan Energi dan Ketenagalistrikan (Trilema)

Transformasi Digital

Pengarusutamaan

- Kesetaraan Gender
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Pembangunan Berkelanjutan
- Modal dan Sosial Budaya
- Transformasi Digital

Kerangka Pembangunan Infrastruktur 2020-2024

Kementerian PPN/ Bappenas

INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR

70%
Rumah Tangga Menempati Hunian Layak
[2018 : 54%]

100%
Hunian dengan Akses Air Minum Layak
[2018 : 88%]

90%
Hunian dengan Akses Sanitasi Layak
[2018 : 75%]

30%
Hunian dengan Akses Air Minum Perpipaan

65 % terhadap informasi dasar 2010
Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas per 10.000 Kendaraan (2010: 3,93)

500 Ribu ha
Jaringan Irigasi Baru
[2015-2018 : 1 Juta ha]

50 m³/detik
Tambahan Air Baku Industri & Domestik
[2015-2018 : 25 m³]

63
Waduk Multiguna
[2015-2019 : 16 Waduk)

3 m³/kg
Produktivitas Air untuk Padi

20 Provinsi
Berisiko bencana tinggi mengalami peningkatan ketahanan bencana

INFRASTRUKTUR EKONOMI

KA KecepatanTinggi Pulau Jawa
Jakarta-Semarang & Jakarta-Bandung

Kereta Api
Makassar - Parepare

Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
Meningkatkan Standarisasi Kinerja dan Pengelolaan Pelabuhan Terpadu

43 Rute Jembatan Udara
[2019: 124 Rute]

21 Bandara Baru

2.500 km
Jalan Tol Barudan/atau beroperasi
[2015-2019 : 1.461 km]

3.000 km
Jalan Nasional Baru
[2015-2019 : 3.387 km]

97%
Kondisi Mantap Jalan Nasional
[2019 : 94%]

1,9 jam/100 km
Waktu Tempuh pada Jalan Lintas Utama Pulau
[2019 : 2,3 Jam/100 km]

27%
Rute Pelayaran yang Saling Terhubung (loop)
[2019 : 23% Loop]

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di
6 Wilayah Metropolitan

Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik
80% Penanganan
20% Pengurangan

TRANSFORMASI DIGITAL

95% Desa
Terjangkau Infrastruktur Jaringan Bergerak Pita Lebar
[2019 : 82%]

60% Kecamatan
Cakupan Jaringan Serat Optik
[2019 : 35,7%]

80% Populasi
Terjangkau Siaran Digital

3 Unicorn Baru
Start Up

ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

4 Juta
Sambungan Rumah Baru Jaringan Gas Kota
[2019 : 0,5 juta sambungan rumah]

1.400 kWh
Konsumsi Listrik Per Kapita Nasional
[2019 : 1.071 kWh]

~ 100%
Rasio Elektrifikasi
[2019 : 98,9%]

6 Unit
Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak (2 GRR dan 4 RDMP)

Highlight Proyek Strategis Nasional

PENDAHULUAN

DEFINISI

PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemda, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis

TUJUAN

untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

PENETAPAN

- Perpres 109/2020 (Perubahan Ketiga)
- Perpres 56/2018 (Perubahan Kedua)
- Perpres 58/2017 (Perubahan Pertama)
- Perpres 3/2016 ttg Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

PSN

201 PROYEK

Sektor	Jumlah Proyek
Jalan dan Jembatan	54
Pelabuhan	13
Bandar Udara	8
Kereta	15
Sektor Kawasan	18
Perumahan	2
Bendungan dan Irigasi	57
Air Bersih dan Sanitasi	12
Tanggul Pantai	1
Energi	15
TIK	5
Pendidikan	1
Jumlah	**201**

10 PROGRAM

1. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK)
2. Program Pemerataan Ekonomi
3. Program Pengembangan Kawasan Perbatasan
4. Program Pengembangan Jalan Akses Exit Toll
5. Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
6. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)
7. Program Pembangunan Smelter
8. Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate)
9. Program Pengembangan Superhub
10. Program Percepatan Pengembangan Wilayah

Major Project, ProPN, dan PSN dalam Mendukung Pencapaian RPJMN

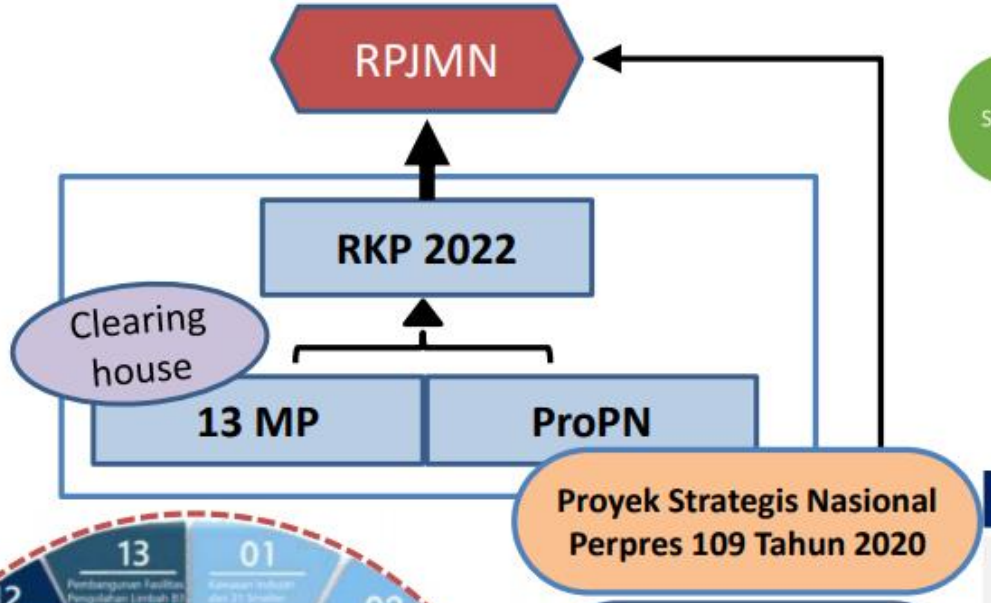

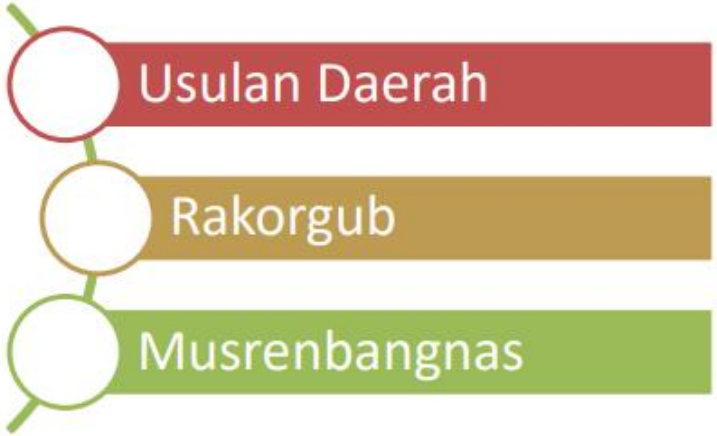

- Air Bersih dan Sanitasi: **6 Proyek**
- Bendungan dan Irigasi **57 Proyek**
- Jalan dan Jembatan: **44 Proyek**
- Perumahan: **2 Proyek**
- Tanggul Pantai: **1 Proyek**
- Total: **110 Proyek** dari 201 PSN merupakan proyek infrastruktur Kementerian PUPR

*22 Proyek diusulkan masuk DPP RKP 2022 sebagai bagian MP

FASILITAS KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

PERENCANAAN

- Percepatan perizinan berusaha dan nonperizinan
- Proyek dapat dilanjutkan meskipun belum sesuai Tata Ruang Darat atau Laut (setelah mendapat rekomendasi)
- Penyediaan anggaran pembebasan lahan
- Penyesuaian rencana induk sektoral untuk mengakomodir PSN
- Dukungan terhadap lingkup studi kelayakan dan dokumen pendukung
- Pemberian Jaminan Pemerintah untuk proyek non-APBN/D
- Pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Pemda

PENYIAPAN

- Prioritas mendapat PDF (*Project Development Fund*)
- Standar minimum prastudi kelayakan dan studi kelayakan
- Biaya sewa, pemindahan dan rehabilitasi aset BUMN ditanggung PJPK berikut pemeliharan dan operasional sesuai *service level agreement*

TRANSAKSI

- Perpanjangan jangka waktu pemenuhan pembiayaan
  - ✓ 9 bulan + 3 bln + 3 bln

KONSTRUKSI

- Pengajuan uji kelayakan konstruksi 30 hari kalender sebelum *provisional handover*
- Percepatan penerbitan sertifikat kelayakan fungsi sesuai NSPK

OPERASI DAN PEMELIHARAAN

- Percepatan peralihan aset menjadi BMN/D pasca berakhirnya kerja sama

PENGADAAN

- Percepatan pengadaan barang/jasa
  - ✓ Pengadaan langsung Js Konsultansi sd Rp 500 jt
  - ✓ Penunjukan langsung kepada lembaga keuangan internasional
- Panel Konsultan/Badan Usaha

PENANGANAN DAMPAK SOSIAL

- Penyediaan program dan anggaran penanganan dampak sosial (dapat dibantu oleh Badan Usaha)

PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM

- Pendahuluan proses administrasi dalam penyelesaian laporan/ pengaduan masyarakat (termasuk yang ditujukan kpd Kepolisian/ Kejaksanan)

DEBOTTLENECKING

- Monev pelaksanaan proyek oleh KPPIP

Kementerian PPN/
Bappenas

TERIMA KASIH

Kementerian PPN/Bappenas

Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat

www.bappenas.go.id